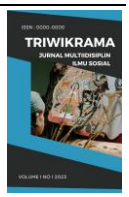
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



REPRESENTASI KEADILAN DAN INSTITUSI DALAM FILM V FOR VENDETTA (2005)

Nessa Nabila Windaputri, Erindah Dimisyqiyani, Amaliyah, Gagas Gayuh Aji, Rizky Amalia Sinulinggas
Departemen Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received September 2025
Revised September 2025
Accepted September 2025
Available online September 2025

Email:
amaliyah@vokasi.unair.ac.id,
nessa.nabila.windaputri-2023@vokasi.unair.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Film V for Vendetta (2005) mengisahkan perjuangan seorang tokoh misterius bernama V yang menentang rezim totaliter di Inggris. Latar belakang penelitian berasal dari fenomena ketidakadilan dan penindasan yag digambarkan melalui karakter V, serta resistensis masyarakat terhadap rezim totaliter. Narasi film ini menampilkan ketegangan antara institusi negara yang represif dengan rakyat yang berusaha merebut kebebasan. Tokoh V hadir sebagai simbol perlawanan, namun pemerintah menggunakan media, sensor, dan propaganda untuk menjaga kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengamati simbol, dialog, dokumentasi, dan gestur yang mencerminkan isu keadilan serta legitimasi institusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa film tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap bahaya otoritarianisme, serta membuka ruang bagi penonton untuk menilai makna sejati dari keadilan dan kebebasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film menampilkan bentuk keadilan sebagai perjuangan kolektif melawan kekuasaan otoriter, sementara institusi digambarkan sebagai instrumen kontrol yang menekan kebebasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah film V for Vendetta merefleksikan isu keadilan sosial dan kebebasan politik yang relevan dengan konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Kata kunci: V for Vendetta, keadilan, institusi, kekuasaan, otoritarianisme, perlawanan sosial.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang beradab dan seimbang. Sejak masa awal peradaban, manusia telah berusaha menghadirkan institusi yang dapat menegakkan hukum, melindungi hak, serta mengatur kewajiban warganya. Rawls (2001) menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam struktur masyarakat, sedangkan Sen (2009) menambahkan bahwa keadilan harus diukur melalui kapabilitas nyata individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dengan demikian, keadilan dan institusi selalu berkelindan dalam menjaga keteraturan sosial dan kualitas demokrasi.

Sejarah mencatat banyak kasus di mana institusi gagal menegakkan keadilan, justru berubah menjadi alat represi. Rezim Nazi Jerman pada abad ke-20 maupun pemerintahan otoriter Korea Utara masa kini memperlihatkan bagaimana kekuasaan absolut dapat mengorbankan kebebasan rakyat demi mempertahankan stabilitas politik (Möller & Badr, 2024). Fenomena ini menunjukkan rapuhnya demokrasi ketika institusi tidak lagi berpihak pada masyarakat. Bond (2025) menambahkan bahwa praktik hukum sering kali dipengaruhi oleh identitas dan ras, sehingga memperlihatkan bagaimana ketidakadilan dapat diperkuat oleh institusi formal.

Media populer memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik tentang keadilan dan legitimasi institusi. Film, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai teks budaya yang mengonstruksi wacana politik dan sosial. Menurut Pramaggiore dan Wallis (2011), film merupakan medium representasi yang efektif untuk menyampaikan realitas kompleks melalui bahasa visual. Kubrak (2020) menemukan bahwa film bahkan dapat

mengubah sikap dan persepsi penonton terkait isu moral dan sosial. Dalam hal ini, film berfungsi sebagai sarana refleksi dan pendidikan kritis terhadap institusi yang berkuasa.

Kajian akademik mutakhir menegaskan bahwa media visual berperan dalam membentuk sikap publik terhadap hukum dan keadilan. Möller dan Badr (2024) menjelaskan bahwa representasi hukum dalam film memengaruhi bagaimana masyarakat memandang legitimasi institusi. Penelitian Reddan et al. (2024) menemukan bahwa film dapat meningkatkan empati penonton terhadap kelompok yang mengalami ketidakadilan sistemik. Sementara itu, Milićević dan Drndarević (2023) menekankan bahwa media yang menggambarkan kehidupan penjara turut membentuk persepsi publik tentang hukuman dan keamanan. Dengan demikian, film memiliki peran strategis dalam membangun opini publik terkait keadilan sosial.

Film V for Vendetta (2005) menjadi contoh relevan untuk diteliti karena menghadirkan narasi tentang relasi antara rakyat dan negara. Berlatar pada rezim totaliter, film ini menggambarkan institusi negara yang menjalankan represi melalui propaganda, sensor, dan intimidasi. Tokoh V tampil sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan sejati berada pada rakyat. Žižek (2011) menafsirkan film ini sebagai kritik ideologis terhadap praktik kekuasaan yang menindas, sedangkan Aveen (2025) menekankan bahwa karya sinematik dapat menjadi sarana pemberdayaan bagi kelompok marjinal. Oleh karena itu, film ini penting untuk dikaji dalam konteks representasi keadilan dan institusi.

Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana keadilan dan institusi direpresentasikan dalam film V for Vendetta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengkaji simbol, dialog, dan gestur yang mengandung makna sosial-politik. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana institusi negara direpresentasikan sebagai entitas represif, serta bagaimana keadilan dimaknai melalui perlawanan rakyat. Dengan cara ini, penelitian dapat memperlihatkan peran media populer sebagai medium refleksi kritis (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018).

Akhirnya, penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16 mengenai peace, justice, and strong institutions. Poin ini menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai,

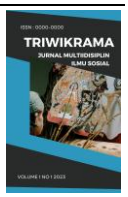
adil, dan inklusif dengan dukungan institusi yang transparan dan akuntabel. Dengan mengaitkan hasil penelitian dengan SDGs, penulis berharap dapat menegaskan urgensi peran institusi dalam menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI MANAJEMEN

Konsep manajemen merupakan dasar penting dalam memahami bagaimana sebuah institusi bekerja dan berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Robbins dan Coulter (2018), manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang ditujukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jones dan George (2015) menekankan bahwa manajemen tidak hanya sekadar koordinasi, melainkan juga kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dalam konteks institusi sosial maupun politik, manajemen berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur masyarakat melalui kebijakan, regulasi, serta struktur birokrasi yang dirancang untuk menjaga keteraturan. Burton dan Obel (2018) menambahkan bahwa institusi yang gagal menyesuaikan sistem manajemen dengan kebutuhan publik akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ORGANISASI DAN TUJUAN

Organisasi dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Robbins dan Judge (2015) menjelaskan bahwa organisasi merupakan wadah kolektif yang memiliki hierarki, pembagian tugas, serta tujuan yang jelas. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana organisasi memperoleh legitimasi sosial. Anderson dan Sun (2017) menekankan bahwa organisasi modern dituntut untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan kepentingan publik. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, organisasi berisiko kehilangan kepercayaan, sebagaimana dijelaskan Möller dan Badr (2024) bahwa legitimasi organisasi sangat ditentukan oleh keterbukaan dan komitmen terhadap keadilan sosial.

KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan memiliki peran krusial dalam menentukan arah serta legitimasi institusi. Menurut Robbins dan Judge (2015), kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain agar tujuan tertentu dapat tercapai. Anderson dan Sun (2017) mengklasifikasikan gaya kepemimpinan menjadi berbagai bentuk, mulai dari otokratik, transaksional, hingga transformasional. Hoch et al. (2018) menekankan bahwa kepemimpinan transformasional mendorong partisipasi dan pemberdayaan, sedangkan gaya otokratik justru memperlihatkan kecenderungan represif. Kualitas kepemimpinan menjadi faktor penting yang menentukan apakah institusi dipersepsikan sebagai adil atau justru menindas.

KEADILAN HAK DAN KEWAJIBAN

Teori keadilan juga memberikan kerangka penting untuk memahami relasi antara masyarakat dan institusi. Rawls (2001) melalui konsep justice as fairness menyatakan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama yang mendasari distribusi hak, kewajiban, serta manfaat sosial dalam masyarakat. Sen (2009)

kemudian mengembangkan *capability approach* yang menekankan bahwa keadilan seharusnya diukur dari sejauh mana individu memiliki kebebasan nyata untuk bertindak. Perspektif ini diperkuat oleh penelitian Fayard et al. (2022) yang menyatakan bahwa institusi publik memiliki tanggung jawab memperluas kapabilitas manusia. Sementara itu, Milićević dan Drndarević (2023) menambahkan bahwa representasi keadilan dalam media berpengaruh signifikan terhadap legitimasi institusi hukum di mata publik.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Selain itu, teori pengambilan keputusan juga relevan dalam menjelaskan bagaimana institusi maupun individu menentukan arah tindakan. Smith (2017) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai opsi yang tersedia. Lerner et al. (2015) menekankan bahwa proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas, tetapi juga oleh emosi yang memengaruhi persepsi risiko. Dalam konteks institusi, keputusan strategis sering kali berimplikasi langsung pada legitimasi kekuasaan, sementara pada individu, keputusan mencerminkan orientasi moral dan nilai yang dianut. Dengan demikian, teori pengambilan keputusan penting untuk memahami bagaimana kebijakan negara maupun respons masyarakat dibentuk.

Berdasarkan pemaparan tersebut, landasan teori dalam penelitian ini mengintegrasikan konsep manajemen, organisasi, kepemimpinan, keadilan, serta pengambilan keputusan. Keseluruhan teori digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis

representasi institusi dan keadilan dalam film, sehingga pembahasan yang muncul konsisten dengan dasar teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus utamanya adalah memahami makna yang terkandung dalam media visual. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif bertujuan menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial melalui perspektif partisipan maupun objek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena isu keadilan dan institusi lebih tepat dijelaskan melalui makna simbolis dan naratif dibandingkan dengan perhitungan kuantitatif.

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Doyle et al. (2020) menjelaskan bahwa kualitatif deskriptif berfungsi untuk menyajikan gambaran sistematis terhadap fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel. Bradshaw et al. (2017) menambahkan bahwa metode ini cocok digunakan ketika peneliti ingin menghadirkan deskripsi yang sederhana namun tetap mampu merefleksikan realitas sosial secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini dipandang relevan untuk mendeskripsikan representasi keadilan dan institusi dalam film.

Teknik yang digunakan merupakan observasi non-partisipatif terhadap film V for Vendetta (2005). Observasi dipandang penting karena memungkinkan peneliti mencatat tanda-tanda visual maupun verbal yang muncul dalam adegan film. Menurut Smith (2019), observasi terhadap media visual membantu peneliti mengidentifikasi pola representasi yang konsisten dengan kerangka teori yang digunakan. Data dikumpulkan dengan menelaah dialog, gestur, ekspresi, tata busana, serta simbol-simbol yang merefleksikan isu keadilan dan institusi.

Objek penelitian berupa aspek representasi yang terkandung dalam film V for Vendetta. Objek tidak difokuskan pada alur cerita secara utuh, melainkan pada tanda-tanda yang dapat ditafsirkan sebagai representasi institusi dan keadilan. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif menempatkan objek bukan sekadar sebagai teks, melainkan sebagai konstruksi makna yang dapat ditafsirkan. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada unsur visual dan verbal yang membentuk pemahaman penonton terhadap isu keadilan.

Data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal langsung dari film V for Vendetta (2005) yang menjadi objek utama penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep manajemen, organisasi, kepemimpinan, keadilan, dan pengambilan keputusan. Sumber sekunder dipilih dengan mempertimbangkan literatur mutakhir dari 5– 10 tahun terakhir, sehingga sesuai dengan standar penelitian akademik (Fayard et al., 2022; Möller & Badr, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Setelah melakukan hasil observasi dan memahami alur cerita dengan seksama, beberapa hasil telah ditemukan dan akan dijelaskan secara deskriptif pada bab ini. Menunjukkan bahwa film V for Vendetta (2005) menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup di bawah rezim totaliter. Pemerintah digambarkan sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan absolut melalui kontrol media, aparat keamanan, dan sensor informasi. Sebaliknya, tokoh V muncul sebagai figur perlawanan yang menentang represi dengan mengusung gagasan kebebasan, keadilan, dan kesadaran rakyat. Representasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara negara sebagai institusi represif dan rakyat sebagai subjek yang menuntut keadilan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Representasi Kekuasaan Institusi Negara

Dalam beberapa adegan, institusi negara direpresentasikan sebagai pengendali mutlak terhadap kehidupan masyarakat. Kanselir Sutler menjadi simbol utama kekuasaan, ditampilkan melalui visualisasi layar besar dengan wajah yang mendominasi ruang, memperlihatkan hierarki kekuasaan yang menakutkan. Cara penggambaran ini menegaskan bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan alat penindasan.



Gambar 1. Kanselir Sutler berpidato di hadapan rakyat melalui media visual yang diproyeksikan di berbagai ruang publik.

Dialog: Sutler: “ We must remain vigilant. Our strength comes from unity. Unity through faith, unity through strength!”

Dialog ini menunjukkan bahwa rezim menekankan kesatuan semu yang dibangun atas dasar ketakutan. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa institusi negara dalam film diposisikan sebagai kekuatan yang menjaga ketertiban bukan demi rakyat, melainkan demi kelanggengan kekuasaan.

Simbol Perlawanan: Tokoh Vdan Topeng Guy Fawkes

Tokoh V menjadi pusat representasi perlawanan terhadap ketidakadilan. Kehadirannya selalu diidentikkan dengan topeng Guy Fawkes yang berfungsi sebagai simbol anonim, menyiratkan bahwa perjuangan melawan represi bukanlah milik satu individu, tetapi gerakan kolektif rakyat. Visual topeng ini berulang kali ditampilkan dalam film, menegaskan pentingnya simbol dalam membangun kesadaran masyarakat.



Gambar 2. V muncul mengenakan topeng Guy Fawkes saat menantang institusi negara di depan publik.

Dialog: V: “ People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.”

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dialog tersebut menegaskan konsep keadilan yang diusung film: kekuasaan sejati berasal dari rakyat, bukan dari institusi represif. Representasi ini memberikan kritik langsung terhadap legitimasi institusi yang kehilangan moralitas ketika menjalankan represi.

Media sebagai Alat Propaganda

Film memperlihatkan bahwa institusi negara menguasai media sebagai sarana untuk membangun narasi tunggal yang mendukung rezim. Stasiun televisi dikontrol penuh dan digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik. Hal ini digambarkan dalam adegan ketika V meretas siaran televisi untuk menyampaikan pesan kepada rakyat, yang sekaligus menjadi simbol perebutan wacana antara negara dan masyarakat.



Gambar 3. Tayangan propaganda pemerintah menampilkan V sebagai ancaman publik.

Dialog (Petugas Media): “The terrorist known as V is nothing more than a lunatic. The government has the situation under control.”

Dialog tersebut menegaskan bagaimana media diposisikan sebagai perpanjangan tangan institusi. Rakyat dipaksa menerima versi kebenaran yang dibangun oleh pemerintah, yang sesungguhnya bertujuan untuk mempertahankan kontrol, bukan menegakkan keadilan.

Peran Rakyat sebagai Subjek Keadilan

Selain fokus pada tokoh V, film juga memperlihatkan bagaimana rakyat menjadi elemen penting dalam representasi keadilan. Adegan klimaks memperlihatkan ribuan warga London mengenakan topeng Guy Fawkes dan berjalan bersama menuju gedung parlemen. Momen ini menandai pergeseran makna keadilan: dari sesuatu yang dimonopoli negara, menjadi sesuatu yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat.

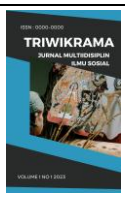


Gambar 4. Ribuan rakyat mengenakan topeng Guy Fawkes dalam aksi damai menuju gedung parlemen.

Dialog (V – pesan terakhir): “This country needs more than a building right now. It needs hope.”

Dialog tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata soal struktur hukum atau fisik institusi, melainkan juga tentang harapan rakyat terhadap kehidupan yang bebas, setara, dan bermartabat. Adegan ini menjadi representasi puncak bahwa kekuatan sejati berada pada rakyat yang bersatu melawan represi.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PEMBAHASAN

Hasil observasi memperlihatkan bahwa institusi negara direpresentasikan sebagai entitas yang menjalankan manajemen kekuasaan secara represif. Robbins dan Coulter (2018) menegaskan bahwa manajemen idealnya mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan bersama, tetapi dalam konteks film, mekanisme ini digunakan untuk menekan masyarakat. Jones dan George (2015) menambahkan bahwa penyalahgunaan fungsi manajemen akan membuat organisasi kehilangan orientasi pada kepentingan publik.

Dari sudut pandang organisasi, negara dalam film diperlihatkan sebagai birokrasi yang mempertahankan kekuasaan melalui hierarki kaku. Anderson dan Sun (2017) menekankan bahwa organisasi yang sehat ditandai dengan transparansi dan keterlibatan publik, sementara Möller dan Badr (2024) menyoroti bahwa legitimasi organisasi hanya dapat bertahan bila konsisten dengan nilai keadilan. Representasi birokrasi dalam film justru menunjukkan kebalikan dari prinsip tersebut.

Kepemimpinan pemerintah diperlihatkan dalam gaya otoriter yang menuntut kepatuhan penuh, sejalan dengan Robbins dan Judge (2015) yang menekankan bahwa kepemimpinan otoriter menciptakan kepatuhan semu. Di sisi lain, tokoh V menghadirkan bentuk kepemimpinan simbolis yang mendekati transformasional, di mana seorang pemimpin menginspirasi masyarakat untuk melampaui kepentingan pribadi (Hoch et al., 2018). Kontras ini memperlihatkan perbedaan antara kepemimpinan represif dan kepemimpinan yang berlandaskan keadilan.

Representasi keadilan dalam film memperlihatkan bahwa legitimasi institusi tidak dapat bergantung pada hukum semata. Rawls (2001) menekankan bahwa keadilan harus mendasari struktur sosial, sementara Sen (2009) melalui capability approach menekankan pentingnya kebebasan nyata. Fayard et al. (2022) menambahkan bahwa kebijakan publik harus diukur dari sejauh mana ia memperluas kapabilitas manusia. Dalam film, keadilan justru muncul dari kesadaran moral rakyat ketika institusi gagal menjalankan perannya.

Pengambilan keputusan yang digambarkan dalam film memperlihatkan kontras antara rezim dan tokoh V. Pemerintah memutuskan strategi berbasis represi untuk mempertahankan kekuasaan, sebagaimana dipahami Smith (2017) bahwa keputusan dalam organisasi sering kali diarahkan pada kelangsungan tujuan internal. Sebaliknya, keputusan V didorong oleh nilai moral dan emosi, selaras dengan Lerner et al. (2015) yang menjelaskan bahwa emosi dapat memengaruhi keberanian dalam membuat keputusan.

Hasil pembahasan ini selaras dengan Sustainable Development Goals poin 16 tentang peace, justice, and strong institutions. Representasi institusi yang rapuh dalam film menjadi refleksi bahwa pembangunan kelembagaan yang transparan, adil, dan akuntabel sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan keadilan sosial (Milićević & Drndarević, 2023). Dengan demikian, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium reflektif bagi masyarakat untuk menilai makna sejati dari keadilan.

KESIMPULAN

Film V for Vendetta (2005) merepresentasikan bagaimana institusi negara dapat bertransformasi menjadi alat represi ketika kekuasaan dijalankan secara absolut. Pemerintah digambarkan menggunakan media, propaganda, dan intimidasi untuk mempertahankan dominasi, sehingga fungsi manajemen, organisasi, dan kepemimpinan tidak lagi berpihak pada rakyat. Sebaliknya, tokoh V muncul sebagai simbol perlawanan yang menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam menegakkan keadilan.

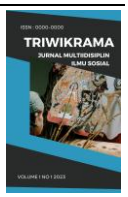
Keadilan dalam film tidak hanya dipahami sebagai produk hukum formal, tetapi juga sebagai nilai moral yang lahir dari kebebasan dan kesetaraan. Representasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi institusi bergantung pada kemampuannya dalam

memperluas kapabilitas masyarakat untuk hidup bermartabat. Keputusan yang diambil oleh rezim maupun tokoh V memperlihatkan perbedaan orientasi: rezim berfokus pada kelanggengan kekuasaan, sedangkan V mengedepankan kebebasan rakyat.

Temuan penelitian ini memiliki relevansi dengan Sustainable Development Goals poin 16 tentang peace, justice, and strong institutions. Film memberikan refleksi kritis bahwa pembangunan kelembagaan yang adil, transparan, dan inklusif merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang damai dan demokratis. Dengan demikian, V for Vendetta tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran mengenai urgensi keadilan dan pentingnya institusi yang berfungsi sesuai prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson MH, Sun PYT (2017) Reviewing leadership styles: Overlaps and the need for a new ‘ full-range’ theory. Int J Manag Rev. 19:76– 96.
Aveen A (2025) Cinema as empowerment: Marginal voices and political resistance.
Journal of Film and Cultural Studies. 12(2):45– 60.
Bond J (2025) Race, identity, and systemic injustice in legal practices. Law and Society Review. 59(1):112– 134.
Bradshaw C, Atkinson S, Doody O (2017) Employing a qualitative descriptive approach in health care research. Glob Qual Nurs Res. 4:1– 8.
Burton RM, Obel B (2018) The science of organizational design: Fit between structure and coordination. J Organization Design. 7(1):1– 13.
Creswell JW, Poth CN (2018) Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE.
Denzin NK, Lincoln YS (2018) The SAGE handbook of qualitative research. 5th ed.
Thousand Oaks: SAGE.
Doyle L, McCabe C, Keogh B, Brady A, McCann M (2020) An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. J Res Nurs.
25(5):443– 455.
Fayard AL, Weeks J, Khan M (2022) Justice, institutions, and human capabilities. J Bus Ethics. 175(3):615– 629.
Hoch JE, Bommer WH, Dulebohn JH, Wu D (2018) Do ethical, authentic, and servant leadership explain variance above and beyond transformational leadership? A meta-analysis. J Manage. 44(2):501– 529.
Jones GR, George JM (2015) Contemporary management. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education.
Kubrak T (2020) Impact of films: Changes in young people’ s attitudes after watching a movie. Behavioral Sciences. 10(5):86.
Lerner JS, Li Y, Valdesolo P, Kassam KS (2015) Emotion and decision making.
Annu Rev Psychol. 66:799– 823.
Milićević J, Drndarević N (2023) Media representations of prison life: Public perceptions of justice and punishment. Crime, Media, Culture. 19(2):195– 212.
Möller K, Badr R (2024) Law, justice, and institutional legitimacy: Media representations in contemporary societies. J Law Media Stud. 18(1):22– 39.
Pramaggiore M, Wallis T (2011) Film: A critical introduction. 3rd ed. London:
Laurence King Publishing.
Rawls J (2001) Justice as fairness: A restatement. Cambridge: Harvard University Press.
Reddan MC, Young H, Falkner C, Wager TD (2024) Narrative media and empathy: Film’s role in shaping social attitudes. Media Psychology. 27(1):88– 107.
Robbins SP, Coulter M (2018) Management. 14th ed. London: Pearson.



Robbins SP, Judge TA (2015) Organizational behavior. 16th ed. London: Pearson.
Sen A (2009) The idea of justice. Cambridge: Harvard University Press.
Smith A (2017) Decision-making in organizations: Rationality and emotion. J Organiz Behav. 38(2):243– 262.
Smith C (2019) Observing media texts: Methodologies in visual research. Visual Studies. 34(3):256– 269.
Žižek S (2011) Living in the end times. London: Verso.